

SKRIPSI



PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten
Soppeng)

Oleh

A.MUH IKHSAN W R

NIM B 121 13 323

FAKULTAS HUKUM
PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)**

Oleh

A.MUH IKHSAN W R

NIM B 121 13 323

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

Program Studi Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)**

Di susun dan diajukan oleh:

A. MUH IKHSAN W R

B 121 13 323


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang
Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Administrasi Negara
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa 8 Agustus 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP: 19620711 198703 1 001


Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H.
NIP: 19680125 199702 2 001

An. Dekan

**Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan**


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 1986 01 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : A.MUH.IKHSAN W R

Nim : B121 13 323

Bagian : HUKUM ADMINITRASI NEGARA

Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA

(Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada skripsi.

Makassar, April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta.,SH.,MH.,DFM

NIP:19610828 1987031003


Dr. Hamza Halim, SH.,MH.

NIP. 19731231 1999031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A MUH IKHSAN W R
Nomor Pokok	: B12113323
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

A.MUH.IKHSAN W R (B121 13 323), “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng)”. Di bawah bimbingan Bapak Pangerang Moenta, selaku Pembimbing I dan Bapak Hamza Halim, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, dengan menggunakan metode data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan/observasi, kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* khususnya prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: BPD belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggota BPD memiliki pekerjaan lain sebagai petani atau peternak. Dan juga aparat desa yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali belum mengetahui prosedur-prosedur pelayanan operasional terhadap masyarakat, dan adanya kekosongan fungsi sekertaris desa yang harus merangkap sebagai Kepala Desa membuat proses administrasi menjadi lamban. Dan dalam transparansi pemerintah desa tidak memanfaatkan sarana yang dapat mendukung proses transparansi pemerintah Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mulia atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam terhatirkan untuk Sang Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Ayahanda A. Oskar dan Ibunda A. Rahmasari yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dan tak lupa penulis haturkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA., selaku rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattintingi, SH., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Ruslan, SH., MH. selaku ketua Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Hamza Halim, SH., MH. selaku pembimbing II dalam menyusun skripsi ini. terima kasih untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Martin Arie, SH., MH., Ruslan Hmbali, SH., MH., dan Ibu Eka Merdakawati Djafar, SH., MH. selaku tim penguji dalam pelaksanaan

ujian skripsi penulis. Terima kasih atas segala saran dan masukan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

6. Kepala Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, beserta jajarannya.
7. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Teman-teman seperjuangan HAN, LPMH dan FORMAHAN yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis sejak awal penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Makassar, Agustus 2017

A.Muh.Ikhsan W.R

DAFTAR ISI

HalamanJudul	i
Pengesahan Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv
Abstrak	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian	14
1. <i>Good Governance</i>	14
2. Desa	19
3. Pemerintahan Desa	22
B. Sejarah Pemerintahan Desa	23
C. Sistem Pemerintahan Desa.....	25
D. Landasan Hukum Pemerintahan Desa.....	26
E. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	27
F. Prinsip Kepastian Hukum	35
G. Prinsip Transparansi	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42

A. Gambaran Umum Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.....	42
B. Pelaksanaan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.....	46
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng	52
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca runtuhnya kekuasaan Pemerintahan orde baru, membawa perubahan baik dalam sendi pemerintahan maupun politik. Isu desentralisasi dan demokratisasi makin keras disuarakan. Hal ini kemudian berdampak pada pemerintah (Legislatif dan Eksekutif) yang telah menghasilkan tiga produk perundang-undangan yang mengubah wajah sistem pemerintahan di Indonesia. Produk pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus utama pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah Kabupaten dan Kota dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Implikasi dari Undang-Undang ini terhadap pembangunan daerah adalah terjadinya pergeseran kewenangan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah. Melalui desentralisasi kebijakan, Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan hanya meliputi kebijakan tentang perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar kepada daerah Kabupaten/ Kota. Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mengatur tentang Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik, dengan fokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di daerah maupun di pusat. Dengan ketiga undang-undang ini menjadi landasan digunakannya konsep *Good Governance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil.

A.W. Widjaja (2002:18) mengemukakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa diatur oleh IGO, IGOB, IS, HIR, RIB, dan sesudah kemerdekaan peraturan ini pelaksanaannya harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Rembuk Desa, dan sebagainya. Namun peraturan tersebut dianggap tidak seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang kearah yang lebih dinamis. Akibatnya Desa dan Pemerintahan Desa pada saat itu memiliki corak yang beranekaragam. Hal ini dianggap hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dijelaskan bahwa pengaturan tentang Desa ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal ini kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, serta susunan, dan kedudukan Pemerintahan Desa namun dalam perkembangannya, undang-undang ini dianggap tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 karena Bangsa Indonesia yang heterogen dan terdiri dari bermacam-macam suku sehingga tidak dapat diatur secara seragam. Adanya sifat bangsa Indonesia yang majemuk ini menyebabkan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Oleh karena itu maka lahirilah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memasukkan Desa dalam 19 Pasal yaitu Pasal 93 sampai Pasal 111. Undang-Undang ini kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam undang-undang ini Desa diatur dalam Pasal 200 sampai Pasal 216, dan kemudian diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintahan Desa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan kata lain, UU yang baru ini memungkinkan terjadinya beberapa perubahan seperti:

- a. Dari pengaturan tingkat nasional (UU) menjadi pengaturan tingkat daerah kabupaten/Kota (perda)
- b. Dari uniformitas menjadi variatif
- c. Dari dominasi birokrasi menjadi institusi masyarakat lokal/adat.

Perubahan ini pada akhirnya juga membawa implikasi pada kemungkinan munculnya kembali variasi antar daerah dalam model pemerintahan di tingkat Desa(atau apapun namanya) menjadi sangat besar. Terjadinya kemungkinan variasi antar daerah tersebut semakin nyata, antara lain ditandai dengan semakin maraknya kebangkitan pemerintahan asli sebagai pengganti Desa. Di Sumatera Barat telah ddihidupkan kembali pemerintahan Nagari, sebuah pemerintahan asli sebagai pengganti pemerintahan Desa. Perubahan ini cukup drastis, baik menyangkut struktur pemerintahan maupun cakupan wilayahnya. Karena Intervensi Desa oleh Negara, menimbulkan banyak persoalan, termasuk di dalamnya pelumpuhan Desa yang sebelumnya hadir sebagai institusi sosial otonom. Sungguhpun demikian, kebangkitan otonomi Desa yang diusulkan oleh Desa juga tidak menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik. Koeksistensi Negara dan institusi desa sebagai institusi asli penyelenggaraan pemerintahan sebagai institusi tidak bisa dihindari. Dari kepentingan penyelenggaraan Negara, Desa perlu dikembangkan sebagai sub sistem pemerintahan. Sungguhpun demikian, perlu dipastikan penyelenggaraan kekuasaan Negara tersebut tidakkontra-produktif bagi penyelenggara kepentingan Desa itu

sendiri. Negara dalam hal ini dipersonalifikasikan oleh pemerintah pusat, telah menjadi sumber dari semua kekuasaan dan kebijakan yang ada, termasuk dalam hal pemerintahan Desa. Selain itu, kehadiran dominasi Negara dalam pemerintahan pada tingkatan Desa juga diwujudkan dengan adanya birokratisasi pada pemerintahan Desa. Semua institusi dan individu lokal saat itu pada akhirnya mengalami negaraisasi sehingga simbol Negara menjadi sangat dominan dalam pemerintahan dan komunitas pada tingkatan Desa. Pada sisi lain, tanpa menghiraukan heterogenitas masyarakat adat dan pemerintahan asli, undang-undang tersebut juga melakukan penyeragaman pemerintahan pada level Desa secara nasional. Uniformitas ini secara sederhana diwujudkan dengan pemberian nama Desa kepada semua bentuk pemerintahan level Desa. Spirit-spirit ini kemudian juga tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan Desa. (Purwo Santoso 3:2003)

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan pola hubungan antara Desa dengan pemerintahan di atasnya di mana keputusan tentang Desa bukan lagi kewenangan pemerintah pusat melainkan wewenang pemerintah Desa yang dituangkan dalam PERDES. Urusan ini menjadi kewenangan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencakup antara lain urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa,

tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa. Perubahan lain juga terjadi pula antara kekuatan politik Desa itu sendiri. Jika dahulu Lembaga Masyarakat Desa (LMD) berada di bawah kontrol kepala Desa, maka dalam Undang-Undang Desa ditetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai badan legislatif baru di Desa yang menggantikan LMD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Desa sehingga BPD dapat mengontrol dan meminta pertanggungjawaban terhadap Kepala Desa. Jadi Kepala Desa bertanggungjawab langsung kepada masyarakat melalui wakil mereka yang duduk dalam BPD. Selain itu BPD juga berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat sehingga segala hal mengenai kepentingan Desa juga mengandalkan partisipasi masyarakat.

Undang-undang Desa tersebut mengembalikan hak masyarakat Desa untuk mengatur urusannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadatnya serta mengaktifkan peran lembaga adat, kelompok-kelompok sosial dan forum-forum warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kepentingan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah memfasilitasi proses desentralisasi desa sehingga memunculkan semangat otonomi Desa. Namun desentralisasi tanpa demokrasi sama saja artinya dengan memindahkan sentralisasi di level

Desa sehingga desentralisasi harus dijalankan dengan demokrasi agar tercipta sebuah hubungan yang strategis antara pemerintah Desa dengan masyarakat.

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan ketatanegaraan Republik Indonesia telah melembagakan diri dalam Lembaga Negara di pusat sampai wujudnya yaitu:

- a. Rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang dikehendakinya sesuai dengan hati nuraninya.
- b. Pemerintah harus memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka tercapainya kemakmuran yang merata.
- c. Segala langkah kebijaksanaan pemerintah, haruslah berdasarkan atas hasil musyawarah.
- d. Dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan jiwa pancasila.
- e. Kestabilan pemerintah sebagai suatu syarat dapat terlaksananya program-program, haruslah tetap dapat menampung adanya perbedaan pendapat yang berkembang dalam masyarakat luas.
- f. Perbedaan pendapat itu wajar, asal dalam penyelesaiannya menurut aturan alam demokrasi dengan mentaati bersama sistem kelembagaan dan musyawarah serta terus berpijak pada kepentingan rakyat sebagai keseluruhan.

Akan tetapi pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi daerah tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup perubahan alat-alat yang di gunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga tersebut secara ekonomis, efisien, efektif,transparan dan akuntabel sehingga cita- cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2014:8) antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi oleh undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum.

Menurut Ari Dwipayana (2003:16) Secara normatif desentralisasi bisa mendorong *good governance*, karena ia hendak mendekatkan diri ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan lokal yang bakal mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah lokal.

UNDP mengajukan 9 karakteristik *good governance* (Sirajuddin 39:2012) sebagai berikut:

1. Partisipasi menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
2. Penegakan Hukum. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi
4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.

6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Syahrul Yasin Limpo (Jurnal Ilmu Hukum *ammana gappa* vol 15 No. 2, 2007: 131) menjelaskan bahwa. “Prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan sepenuhnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah, khususnya terhadap pelayanan publik. Disebabkan lemahnya dukungan substansi produk hukum, partisipasi sosial, transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kurangnya tanggung jawab penyelenggara pemerintahan daerah, serta belum jelasnya mekanisme penerapan prinsip-prinsip tersebut”.

Prinsip-prinsip tersebut memang masi sangat sulit dijumpai penerapannya, karena instansi-instansi di Indonesia masi sering menggunakan pelayanan yang berlandaskan pada “kebiasaan”, serta pemerintah yang berfungsi menjadi pelayan publik masi sering sekali ditemukan tidak cakap hukum, salah satunya di Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, dimana Kepala Desa di Desa tersebut tertangkap sedang melakukan perjudian sehingga dapat di lihat Kepala Desa tersebut tidak cakap hukum. Hal ini pasti sangat berdampak terhadap para aparat yang berada di bawahnya, karena dalam Pasal 25 ayat (2) poin(b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kewenangan Kepala Desa adalah mengangkat dan memberhentikan aparat Desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Kepala Desa selaku yang berwenang menunjuk aparatur Desa yang di rasa berkompeten tidak cakap hukum, kemungkinan para aparatur yang berada dibawahnyapun tidak jauh berbeda. Hal ini dibuktikan bahwa kurangnya aparat Desa yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, disebabkan karena tingkat pendidikan aparat pemerintah Desa kebanyakan hanya sampai SMP dan SMA.

Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)” untuk memenuhi cita-cita reformasi tersebut, *good governance* tidak hanya harus diterapkan dipemerintahan pusat saja tapi disetiap sendi

pemerintahan mulai dari kota, kabupaten, kecamatan dan juga Desa. Karena Pemerintah Daerah dan Desa memiliki peranan penting dalam memajukan fungsi pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara di daerah pada khususnya.
- b. Menjadi masukan bagi pemerintahan daerah dan Pemerintahan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Khususnya dalam Pemerintahan Desa

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. *Good Governance*

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara di Indonesia, terminologi *good governance* telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN)

dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (Nuryanto.A.Daim 2014:43).

Dalam pengertiannya istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie Rochman (Joko Widodo 2001:18) mengemukakan bahwa konsep *government* merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggara otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara. Konsep pemerintahan berkonotasi dengan peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi consensus, keadilan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Rosyada,Dede, dkk 2003:183).

UNDP (Sudarmayanti 2004:3) mendefinisikan *governance* sebagai berikut, *Governance* adalah kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola sebgayaan urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk

mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Lebih lanjut UNDP (Joko Widodo 2001:19) menegaskan. *Governance* adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang complex melalui warga Negara (citizens) dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Good governance sering diartikan sebagai Pemerintahan yang baik. Lembaga Administrasi Negara (Joko widodo 2001: 23) mengartikan *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *Publik good and service*. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. *Good* dalam *good governance* menurut LAN (Joko widodo 2001: 23) mengandung dua pengertian, Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN (Joko widodo 2001 : 24) adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung

jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara sektor swasta dan masyarakat.

Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan member peluang ketimbang mengontrol, dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Joko Widodo 2001:24).

World Bank (Adi Dwipayana,2003 : 18) memberi batasan *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya.

Sedarmayanti (2004:38) mengelompokkan *Governance Stakeholder* kedalam tiga kelompok:

- a. Negara/Pemerintahan, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor Swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif interaksi dalam sistem pasar, seperti: Industri pengelolaan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani. Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah

dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Menurut Jimly Assidiq (2004:92) dalam sistem Negara modern yang berlandaskan pada supremasi hukum dan konsitusi, Negara, pasar, dan masyarakat madani, harus berada dalam posisi yang seimbang, dan berada dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. Akan tetapi, pembedaan diantara ketiganya dianggap penting, sehingga ketiganya tidak saling mengintervensi kedalam urusan masing-masing. Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-hukumnya sendiri. Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan. (Jimly Assiddiqie, 2005:43)

Selanjutnya dijelaskan jika kekuasaan Negara jauh lebih besar melampaui masyarakat dan pasar, maka demokrasi tidak akan tumbuh karena terlalu didikte dan dikendalikan oleh kekuasaan Negara. Maka yang dianggap paling ideal adalah apabila ketiga hal tersebut tumbuh dengan seimbang, sama-sama kuat dan saling mempengaruhi satu samalain dalam hubungan yang fungsional dan sinergis. Karena apabila salah satunya lebih dominan dibanding yang lain maka yang lain akan menjadi lemah, sehingga dapat menimbulkan ketidakaturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Mifta Toha (2004:72) selain dari komponen pemerintah, swasta, atau rakyat, ada satu komponen yang sangat mempengaruhi untuk melahirkan suatu tata pemerintahan yang baik yaitu moral. Moral menghubungkan dan bertaut erat pada ketiga komponen tersebut.yang saling berinteraksi menciptakan tata pemerintahan yang baik.Moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama.Ajaran agama pada pribadi-pribadi yang berada pada ketiga komponen tersebut. Dengan melaksanakan ajaran agamanya pada ketiga komponen tersebut, maka moral masing-masing pelaku akan berperan besar sekali dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Ari Dwipayana (2003:22) mengemukakan kalau mainstream wacana *good governance* selama ini menekankan tiga poros (negara, masyarakat sipil dan pasar) maka pemetaan *governance* di Desa terdiri dari empat elemen yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Organisasi Masyarakat,institusi lokal dan warga masyarakat.

2. Desa

Terdapat berbagai definisi yang berbeda-beda untuk menggambarkan kesatuan masyarakat yang terkecil atau Desa.Istilah yang digunakan untuk menyebutkan kesatuan masyarakat terkecil itu beraneka ragam misalnya Huta di Batak, Nagari di Minang kabau dan sebagainya.

Menurut Soetarjo Kartohadikusumo (Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983:285), Desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal

suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan tersendiri. Sedangkan, Hazairin (Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983:285) berpendapat bahwa desa di Jawa dan Madura, nagari di Minangkabau sebagai masyarakat hukum adat. Dan yang beliau maksudkan dengan masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya. Teer Har (Surojo, 1979:86) mengemukakan bahwa. Diseluruh kepulauan Indonesia padatingkatan rakyat jelatah, terdapat pergaulan hidup dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan batin.

Golongan-golongan itu mempunyai tatasusunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan pembubaran golongan itu. Golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawan milik ghaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum. Dari pendapat Ter Haar tersebut Surojo (1979:86) menyimpulkan bahwa Desa ataupun yang disebut dengan nama lain adalah sama dengan persekutuan hukum karena memiliki tata susunan yang tetap, pengurus sendiri dan harta kekayaan sendiri.

Pemerintah Indonesia mendefinisikan Desa dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979, Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Undang-Undang No 32 Tahun 2004, dan Undang Undang No 23 Tahun 2014. Berikut definisi Desa yang tercantum dalam Undang-undang diatas.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mendefinisikan Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indoneisa.

Di Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus-urusan pemerintahan setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memasukkan pengaturan tentang Desa memberikan definisi Desa yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Selain itu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan definisi Desa yang juga tidak jauh berbeda dengan definisi Desa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Definisi Desa menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain yang mulai sekarang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pada Pasal 1 angka (43) yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain yang mulai sekarang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun terdapat perbedaan di antara definisi-definisi tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya terdapat persamaan mendasar yaitu desa dipandang sebagai suatu kesatuan masyarakat untuk mengurus diri sendiri.(Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1993:266).

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan Pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003:19).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mendefinisikan Pemerintahan Desa sebagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan (Widjaja 2003:19).

Definisi Pemerintahan Desa juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (2) tentang Desa yang berbunyi: Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintahan Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 1 huruf (h) menyatakan bahwa, " Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

B. Sejarah Pemerintahan Desa

Sejarah perkembangan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pasal 188 Jo Pasal 128 I.S yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Penduduk negeri asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (Pimpinan). Pengaturan lebih lanjut dalam IGOB (*Instanche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*) L.N.1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1938 No. 681. Nama dan jenis persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan asli di Jawa dan Madura disebut Desa. Sedangkan bekas keresidenan Palembang disebut Marga dan bekas keresidenan Bangka Belitung disebut Haminte.

2. Masa Awal Kemerdekaan

Sewaktu awal kemerdekaan Pemerintah Marga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut diatur dalam penjelasan angka II.

3. Penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur Desa dari segi Pemerintahannya, berbeda dengan pemerintahan Marga disamping mengatur pemerintahan juga mengatur adat istiadat.

4. Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga perlu diganti/dicabut. Penggantian Undang-Undang ini dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya ada yang mengatur tentang Desa. (A.W Widjaja 2003: 23-24).

Selanjutnya dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketata negaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti kemudian ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merivisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini juga dimasukkan peraturan mengenai Desa dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216.

C. Sistem Pemerintahan Desa

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengemukakan bahwa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selain itu di Desa juga dibentuk suatu wadah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dan juga sekaligus berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa, Lembaga tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD, yang pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka (4) yang berbunyi, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

D. Landasan Hukum Pemerintahan Desa

Indonesia adalah Negara Hukum, hal itu termaktup dalam konsitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Sehingga setiap keputusan atau putusan yang akan diambil atau dilaksanakan oleh pemerintah harus berlandaskan hukum, baik itu dalam rana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota dan Daerah/Desa.

Menurut (Bagir Manan 1992:8) besarnya peranan Peraturan Perundang-Undangan terjadi karena beberapa hal:

- a. Peraturan Perundang-Undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya.
- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali,
- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji baik segi-segi formal maupun materimuatannya.
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undang dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi Negara

yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Maka dari itu dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa maka terdapat landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang termuat dalam Pasal 98 sampai Pasal 111 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
3. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 200 sampai Pasal 216.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

E. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Pada dasarnya konsep *Good Governance* memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan pada lembaga-lembaga negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta maupun masyarakat madani (*civil society*). *Good governance* berdasarkan pandangan ini suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta.

Kesepakatan tersebut keseluruhan termasuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Santosa menjelaskan .(Sirajuddin, Didik Sukriano, dan Winardi 2012: 39) bahwa “*Governance* sebagaimana yang didefinisikan UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif atau efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan.

United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan (Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi 2012: 39-40) ada Sembilan Prinsip *Good Governance* yaitu:

1. Partisipasi menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
2. Penegakan Hukum. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi

4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Menurut Mardiasmo (Rosyada, Dede, dkk 2003) dari ke-sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang sangat berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

Sedarmayanti (2004:7) menjelaskan bahwa ada empat unsur yang sangat mempengaruhi ciri dari pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Akuntabilitas

Adanya kewajiban dari aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

2. Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

3. Keterbukaan

Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.

4. Aturan Hukum

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Genie Rochman (Joko Widodo 2001:26) juga menegaskan bahwa *good governance* terdapat empat unsure utama yaitu, akuntabilitas, adanya kerangka hukum, informasi, dan transparansi. Sedangkan Bhatta (Joko Widodo 2001:26) mengemukakan empat unsure *good gornance* yaitu, akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, dan Nepotisme dinyatakan bahwa:

Asas-asas penyelenggaraan Negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Porporionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas

Asas-asas ini kemudian dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Sirajuddin, Didik Sukriano, dan Winardi 2012: 40-41). yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, menurut Levine (Sirajuddin, Didik Sukriano, dan Winardi 2012: 41) produk pelayanan publik dalam Negara demokrasi paling tidak harus memenuhi tiga indikator, yakni:

1. Responsivitas, adalah daya tanggap penyedia jasa terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan
2. Responsibilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas, adalah suatu ukuran yang menentukan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholder* dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Adapun hal-hal yang memperbaharui *Good Governance* (Effendi, 2005):

1. Integritas Pelaku Pemerintahan

Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dan para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi.

2. Kondisi Politik dalam Negeri

Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya *good governance* konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan dilapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.

3. Kondisi ekonomi masyarakat

Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah social yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

4. Kondisi Sosial masyarakat

Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan riil Good Governance. Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Namun jika masyarakat belum berdaya dihadapan Negara, dan masih banyak timbul masalah

social didalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan *good governance* bisa ditegakkan.

5. Sistem Hukum

Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan Negara. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan *good governance*. Kelemahan system hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. *Good Governance* tidak akan berjalan dengan baik diatas system hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan system hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya *good governance*.

F. Prinsip Kepastian Hukum

Setiap perbuatan pemerintah harus berlandaskan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), asas kepastian hukum adalah, asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Menurut Ridawan HR (2011:245) asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait dengan erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau

mengubahnya untuk kerugian yang berkempentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan.

Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan dengan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dtujuh harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya. Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu asas *het vermoeden van rechmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum diuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.

G. Prinsip Transparansi

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), asas keterbukaan atau transparansi yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Agus Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur

tersebut bersifat “simple, straightforward and easy to apply” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely and readily available).

Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menguraikan tentang perangkat-perangkat penelitian, mulai dari lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data dan teknik analisis data. Perangkat-prangkat ini akan digunakan untuk membantu dalam kelangusungan penelitian ini.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Desa Pesse/ Kecamatan Donri-donri/ Kabupaten Soppeng, alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena di Kabupaten Soppeng masi jauh dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* belum terlaksana dengan baik khususnya prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang akan diperoleh langsung dari responden yang berasal dari pemerintah desa maupun masyarakat Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari instansi Pemerintah Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng dan Peraturan lainnya maupun data pendukung yang diperoleh dari buku-buku hasil penelusuran studi kepustakaan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Studi Lapangan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Cara mendapatkan data yang sudah ada dan didokumentasikan pada instansi yang terkait.

b. Wawancara

Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden.

c. Observasi

Diikuti kunjungan dan pengamatan langsung pada lokasi penelitian

D. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer atau sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan cara menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan permasalahan yang timbul pada pelaksanaan asas-asas *Good Governance* yang timbul pada pelaksanaan Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

Desa Pesse adalah salah satu Desa dari Sembilan Desa yang terletak di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, dengan luas Desa 5.570Ha. Secara geografis Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat: Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru
- b. Sebelah Utara: Desa Pising dan Desa Sering, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng
- c. Sebelah Timur: Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng
- d. Sebelah Selatan: Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Penduduk Desa Pesse didominasi oleh penduduk asli yang bersuku bugis dan pendatang yang sebagian bersuku Mangkasa dan Jawa. Sehingga masyarakat di desa ini kaya akan berbagai macam bahasa. Masyarakat Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng mayoritas beragamaan Islam. Mayoritas penduduk bergantung pada pekerjaan bercocok tanam dengan lahan pertanian seluas 1.105 Ha.

Sebagian besar pemukiman penduduk di Desa Pesse menggunakan papan/kayu sebagai dasar dalam pembuatan pemukiman, selebihnya adalah dari batu bata. Pola penataan bangunan pemukiman tersebut yakni

pekarangan rumah hanya dimanfaatkan sebagian kecil sebagai taman dan tempat menanam tanaman sayuran dan buah-buahan. Walaupun demikian, perumahan warga terlihat cukup rapi.

Fasilitas umum seperti jalan raya yang menghubungkan setiap dusun kondisinya masih kurang baik, dimana jalan raya tersebut ada yang mengalami kerusakan, seperti rusak atau berlubang dan juga sebagiannya masi jalan kerikil. Sehingga, kondisi jalan yang seperti itu masih mengganggu fasilitas warga dalam melakukan aktifitas kesehariannya.

Untuk bidang pendidikan, tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Desa Pesse hanya lulusan SMA dan SLTP, sedangkan lulusan perguruan tinggi masih minim dan berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya menengah keatas.

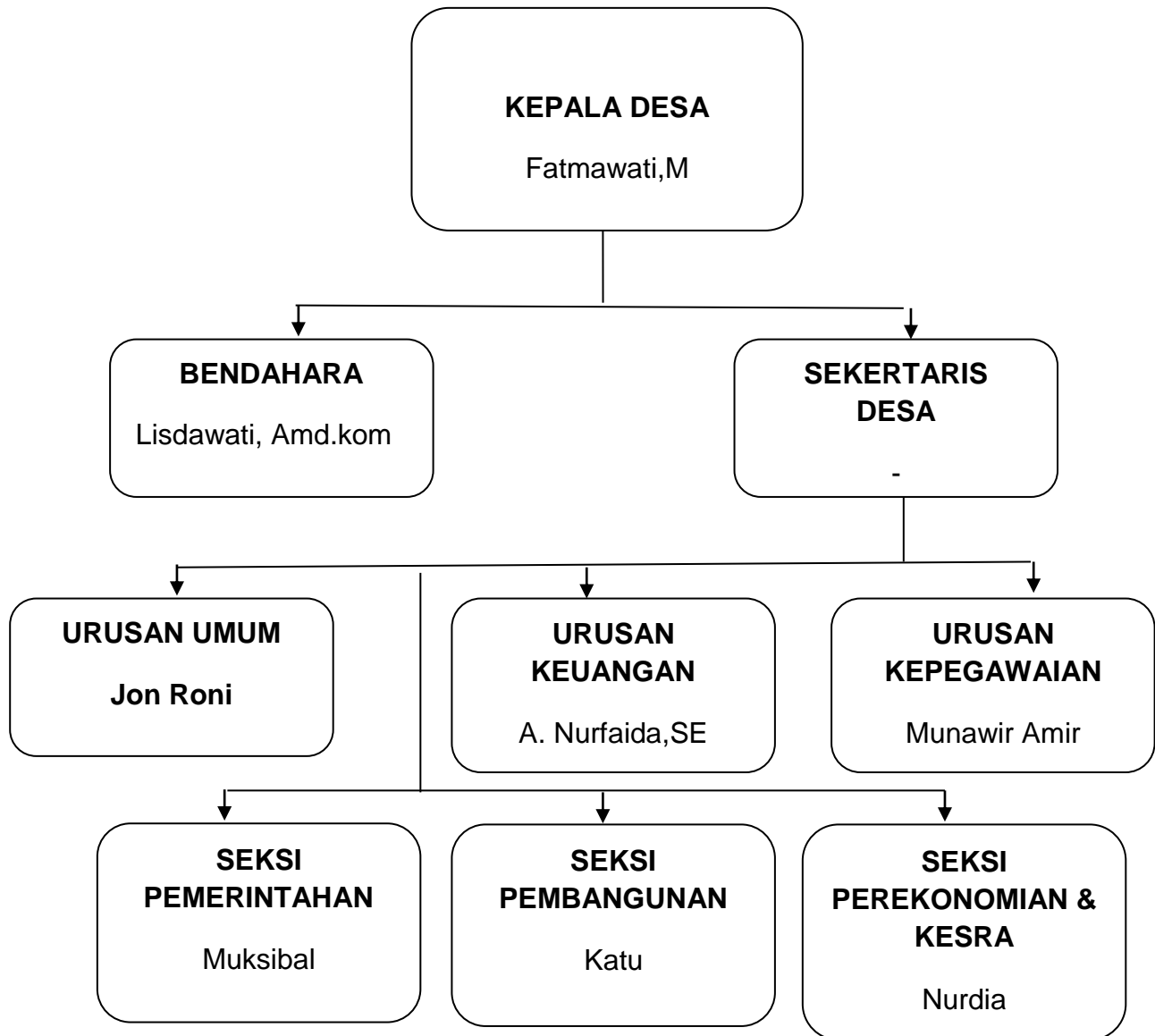
Penduduk Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng memiliki pekerjaan beragam. Adapun rinciannya seperti berikut:

1. Petani	: 906 Jiwa
2. Buruh Tani/ Buruh Swasta	: 176 Jiwa
3. PNS	: 138 Jiwa
4. Pensiunan	: 21 Jiwa
5. Pengusaha	: 15 Jiwa
6. Peternak	: 102 Jiwa
7. Bidan Desa	: 1 Jiwa
8. TNI	: 2 Jiwa

9. Polri	: 1 Jiwa
10. Montir	: 26 Jiwa
11. Pertukangan	
a. Kayu	: 25 Jiwa
b. Batu	: 32 Jiwa
12. Karyawan Swasta	: 25 Jiwa
13. Wiraswasta	: 117 Jiwa

Dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng terdiri dari sebelas aparat desa yang mana di Kepalai oleh Fatmawati selaku pelaksana tugas. Hal ini dikarenakan karena Kepala Desa sebelumnya yang bernama Mansyur, SE, sedang menjalani masa hukuman dikarenakan tindak pidana yang dilakukan, sehingga Fatmawati selaku sekertaris diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

Bagan Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Pesse



Sumber Data: Dokumen Desa Pesse

B. Pelaksanaan Prinsip-prinsip *good governance* Dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng

1. Prinsip Kepastian Hukum

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* khususnya prinsip kepastian hukum dalam pelayanan publik pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Pendapat responden terhadap pelaksanaan prinsip kepastian hukum dalam pelayanan publik Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng

No	Pendapat Responden	Jumlah	Persentase
1	Terlaksana dengan Baik	8	40%
2	Kurang terlaksana	12	60%
3	Tidak terlaksana	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data primer

Sesuai dengan data pada tabel 1 tersebut menunjukkan 8 responden menanggapi bahwa prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng telah terlaksana dengan baik, sedangkan 12 diantaranya menanggapi bahwa prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng masih kurang terlaksana.

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng masi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya produk hukum Pemerintah Desa yang menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat dan produk hukum mengenai standar oprasional prosedur, sebagai mana yang diatur dalam 49 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan. Sehingga Pemerintah Desa masih mengikut ke standar oprasional prosedur Kabupaten Soppeng, padahal standar operasional tersebut pada hakikatnya hanya ditujukan untuk pegawai negeri sipil.

Produk hukum yang dihasilkan Pemerintah Desa adalah berupa Keputusan Kepala Desa yang berfungsi mengatur kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Produk hukum Pemerintah Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng yang telah dihasilkan pada tahun 2016-2017 adalah:

1. Kepala Desa No.01/KPTS/DPS/I/2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
2. Keputusan Kepala Desa No.04/KPTS/DPS/I/2016, tentang Penunjukan Petugas /Pengurus Aset Desa T.A 2016

3. Keputusan Kepala Desa No.5/KPTS/DPS/I/2016, tentang Pembentukan Tim Pengelolah Kegiatan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, Tahun Anggaran 2016
4. Keputusan Kepala Desa No.06/KPTS/DPS/I/2016, tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Anggaran 2016
5. Keputusan Kepala Desa No. 07/KPTS/DPS/I/2016, tentang Penunjukan Konsultan Perencanaan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016
6. Keputusan Kepala Desa No. 08/KPTS/DPS/I/2016, tentang Penunjukan Konsultan/Tenaga Ahli Pengwas Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Tahun Anggaran 2016
7. Keputusan Kepala Desa No.09/KPTS/DPS/I/2016, tentang Pengangkatan Ketua RW,RT Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016
8. Keputusan Kepala Desa No.10/KPTS/DPS/I/2016, tentang Pmbentukan Tim PTPKD Desa Pesse T.A 2016
9. Keputusan Kepala Desa 11/KPTS/DPS/I/2016, tentang Pembentukan Petugas POSYANDU.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* hanya terlaksana pada prinsip transparansi saja, dimana tercermin dalam Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa. Sehingga penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang lain tidak diatur secara khusus.

Lain-lain sesuai dengan kebutuhan Desa

Untuk setiap penyusunan Keputusan Kepala Desa maka Pemerintah Desa dan BPD mengadakan rapat. Rapat ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan pemuda dan PKK, para ketua RT/RW, serta perwakilan organisasi-organisasi publik masyarakat lainnya. Sehingga Setiap Keputusan yang akan diambil diharapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

2. Prinsip Transparansi

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya. Dalam hal ini rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dari pelaksanaannya dalam arti lain bahwa segala kebijakan dan pelaksanaan kebijakan harus selalu secara terbuka dan diketahui oleh umum. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Pendapat responden terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng

No	Pendapat Responden	Jumlah	Persentase
1	Terlaksana dengan Baik	6	30%

2	Kurang terlaksana	14	70%
3	Tidak terlaksana	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Primer

Sesuai dengan data pada tabel 2 tabel tersebut menunjukkan 6 responden menanggapi Pemerintah Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng telah transparan, sedangkan 14 responden mengatakan kurang transparan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng belum cukup optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang belum terlaksana dengan cukup baik, Selain itu, hal ini juga cukup dipengaruhi oleh masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di Desa Pesse.

Kepala Desa Pesse menganggap Pemerintah Desa Pesse sebenarnya telah cukup transparan dalam hal kebijakan dan keuangan, karena menurutnya dalam setiap pengambilan kebijakan maupun penyusunan APBDes selalu diadakan sosialisasi kepada masyarakat.

M. Naharis selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menyatakan, proses sosialisasi yang diadakan seringkali komunikasinya hanya berjalan satu arah dari Pemerintah Desa saat meminta persetujuan dari warga, hal ini

disebabkan karena adanya proses kultural yang menempatkan Kepala Desa sebagai orang yang paling berpengaruh sehingga membuat masyarakat segan untuk berkomentar. Seperti saat diadakannya rapat pengambilan keputusan dalam rangka festival kebudayaan, setiap kebijakan yang diambil tanpa disadari hanya di dominasi oleh Kepala Desa saja, mulai dari penetapan tanggal, tempat, dan Dana yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

Dalam hal pelayanan Publik, juga menganggap mereka sudah transparan dalam memberikan informasi mengenai prosedur dan pengeluaran untuk memperoleh pelayanan administratif. Seperti ketika masyarakat ingin mengurus akta kelahiran, sertifikat tanah dan sebagainya, aparat desa selalu memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana cara dan waktu pengurusan. Dari hasil wawancara dengan responden, mereka mengatakan memang aparat Desa selalu memberikan informasi yang cukup jelas dalam pelayanan administratif, akan tetapi informasi ini hanya dalam bentuk lisan. Sehingga setiap kali masyarakat ingin melakukan pengurusan surat-surat, maka ia harus bertanya lagi terlebih dahulu tentang prosedur administratifnya. Warga masyarakat menginginkan informasi yang lebih jelas semisal dengan bentuk tertulis.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Sakeria, Jika ada informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat selalu tersebar dari mulut kemulut. Salah satu contohnya adalah, pada saat ada pembagian jatah raskin,

informasi tersebut disampaikan dari satu warga ke warga yang lainnya. Ketika ada warga yang mengambil jatahnya di Kantor Desa maka, ia akan diminta untuk menyebarkan informasi tersebut kepada warga lain untuk mengambil jatahnya. Kepala Desa tidak menugaskan kepada aparat untuk menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat umum.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Dalam penelitian, penulis menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* khususnya prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Pendukung
 - a. Kepastian Hukum

Berdasarkan data pada table 1 mengenai pendapat responden terhadap prinsip kepastian hukum dalam pelayanan Publik Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, menunjukkan 8 atau 40% dari 20 responden menyatakan bahwa prinsip kepastian hukum telah terlaksana dengan baik. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Katu selaku seksi pembangunan mengungkapkan bahwa:

“Penerapan Prinsip kepastian hukum di Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng sudah bisa dikatakan baik, karena saat terjadi pelanggaran petugas kepolisian dengan sigap mengambil tindakan. Seperti saat terjadi kasus pidana yang dilakukan Kepala Desa Pesse yang saat ini menjadi terdakwa”. (Kantor Desa Pesse, 09 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penerapan prinsip kepastian hukum di Desa Pesse sudah bisa dikatakan baik, hal ini didukung dengan adanya kordinasi yang baik antara pemerintah Desa dan aparat penegak hukum.

b. Transparansi

Berdasarkan data pada tabel 2 mengenai Pendapat responden terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, menunjukkan 6 atau 30% dari 20 responden menanggapi Pemerintah Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng telah transparan, hal ini ditegaskan dari hasil wawancara dengan Fatmawati selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Pesse mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan Pemerintahan Desa Pesse telah cukup transparan, karena setiap tahun pemerintah desa selalu mengadakan rapat terbuka terkait laporan keuangan Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Dimana rapat ini mengundang seluruh elemen yang ada di Desa Pesse, seperti BPD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Masyarakat Desa secara umum”. (Kantor Desa Pesse, 09 Maret 2017)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi di Desa Pesse telah terlaksana. Hal ini didukung dengan rapat terbuka yang diadakan oleh aparat Desa setiap tahunnya.

2. Faktor Penghambat

a. Kepastian Hukum

Berdasarkan data pada table 1 mengenai pendapat responden terhadap prinsip kepastian hukum dalam pelayanan Publik Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, menunjukkan 12 atau 60% dari 20 responden menyatakan bahwa prinsip kepastian hukum di Desa Pesse masih kurang terlaksana, hal ini dipertegas dari hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf selaku Ketua LKMD yang mengungkapkan bahwa:

“Faktor yang menghambat kepastian hukum di Pemerintahan Desa Pesse adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga masih banyak aparat desa yang belum mengetahui betul tugas dan fungsinya, serta pengetahuan yg masih minim dalam penggunaan teknologi, sehingga sering kali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dipengaruhi karena faktor pendidikan aparat desa yang kebanyakan hanya sampai pada tahap Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan prinsip kepastian hukum adalah BPD belum mampu menjalankan perannya sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi karena para anggota BPD yang rata-rata bekerja di instansi pemerintah terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusan pribadi mereka, sehingga hubungan emosional dengan masyarakat belum bisa terbangun dengan baik. Masyarakat menganggap BPD hanya sebagai pengambil keputusan dan pembuat kebijakan bersama Kepala Desa”. (Kantor Desa Pesse, 21 Maret 2017).

Hal ini senada dengan apa yang diungkap oleh A. Ardi salah seorang warga Desa Pesse bahwa:

“Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan kepastian hukum di desa pesse adalah karena adanya kekosongan jabatan sekertaris desa sehingga adanya keterlambatan dalam pengurusan surat atau administrasi. Seperti yang pernah saya alami sendiri sewaktu mengurus surat keterangan telah menikah di kantor Desa Pesse, saya menunggu bolak-balik selama tiga hari, karena Kepala Desa seringkali tidak berada di tempat. Padahal surat tersebut bisa diselesaikan dalam waktu sehari.”(Desa Pesse, 7 Mei 2017)

Hal serupa juga dialami oleh Hasna saat meminta pembuatan surat keterangan telah menikah, mengatakan:

“Saat pembuatan surat pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), saya harus menunggu selam 2 hari dikarenakan Kepala Desa yang jarang berada di kantor.”(Desa Pesse, 7 Mei 2017).

Hal ini bertentangan dengan Pasal 67 ayat (2e) yang berbunyi “Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.”

Dari hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip kepastian hukum adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan BPD masi kurang optimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai Badan pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

b. Transparansi

Berdasarkan data pada table 2 mengenai Pendapat responden terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam Pemerintahan Desa Pesse

Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, menunjukkan bahwa 14 atau 70% dari 20 responden menyatakan prinsip transparansi di Desa Pesse kurang transparan dalam pelaksanaan pemerintahan. Karena masih banyaknya sarana-sarana yang dapat mendukung proses transparansi, seperti papan pengumuman yang terdapat di Kantor Desa tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua LKMD M. Yusuf mengatakan bahwa:

“Sarana dalam pelaksanaan transparansi sudah memadai, seperti adanya papan pengumuman. Akan tetapi sarana tersebut belum digunakan secara optimal. seperti informasi di papan pengumuman yang jarang diperbaharui.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, khususnya mengenai prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum adanya produk hukum Pemerintah Desa yang menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat dan produk hukum mengenai

standar operasional prosedur, sebagai mana yang diatur dalam 49 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan. Sehingga Pemerintah Desa masih mengikut ke standar operasional prosedur Kabupaten Soppeng, padahal standar operasional tersebut pada hakikatnya hanya ditujukan untuk pegawai negeri sipil.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan kepastian hukum dan transparansi Pemerintah Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng yaitu

Faktor penegak hukumnya, seperti aparat Desa yang masih memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya dan anggota BPD yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggotanya sibuk dengan pekerjaan lainnya. Dan Aparat Desa yang jarang memperbaharui informasi sehingga setiap kali masyarakat ingin melakukan pengurusan persuratan, maka ia harus bertanya terlebih dahulu tentang prosedur administratifnya.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan:

1. Agar Pemerintah Desa lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan terhadap aparat desa dan juga selanjutnya dalam pemilihan aparat desa agar pemerintah desa melakukan tes kepatutan yang lebih ketat.
2. Hubungan yang sinergis antara Pemerintah Desa, masyarakat politik (BPD), masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi harus diciptakan BPD hendaknya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga fungsi sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dapat terlaksana lebih optimal. Selain itu, sebaiknya masyarakat ikut andil dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqe Jimly, 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Daim A. Nuryanto, 2014. *Hukum Administrasi*. Laskambang Justitia: Surabaya.
- Dwipayana Ari, AAGN, Gaffar Karim Abdul, dkk, 2003 *Pembaruan Desa Secara Partisipatif*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Dwipayana Ari, AAGN., et, al, 2003. *Membangun Good Governanve di Desa*. IRE Press: Yogyakarta.

Dwiyanto Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*
Gadjah Mada University: Yogyakarta.

Kusnardi Moh, dan Harmily Ibrahim, 1983 *Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indoneisa dan CV. Sinar Bakti: Jakarta.

Manan Bagir, 1992. *Dasar-dasar Perundang Undangan Indonesia*. IN-HILCO: Jakarta.

Rosyada, Dede dkk., 2003. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat madani*, Edisi revisi. Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media: Jakarta.

Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian kedua*. CV. Mandar Maju: Bandung

Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, 2012. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. Setara Press: Jakarta.

Thoha Mifta, 2004. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Widjaja, AW, 2004. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Widodo Joko, 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Rra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. PT Insan Cendekia: Jakarta.

Jurnal dan Makalah

Effendi, Sofyan, 2005. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.

Limpo Yasin Syahrul, 2007. *Jurnal Ilmu Hukum ammana gappa vol 15 Nomor 2*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembaharuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2007 tentang Badan Pemusyawaratan Desa

Sumber Internet

<http://www.aspirasirakyat.com/2016/07/polres-soppeng-amankan-14-pelaku-judi.html>, hari rabu tanggal 21 desember pukul 22.30



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

Nomor : 1555/UN4.5.3/PL.02/2017
Lampiran : -
Hal : PENELITIAN

Makassar, 13 Februari 2017

Kepada
Yth. : Kepala Desa Pesse
di,
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : A MUH IKHSAN W R
No. Pokok : B12113323
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : BTN MAKKIO BAJI/ANTANG Kelurahan Bangkala Kecamatan MANGGALA

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Andi Pangerang,SH.,MH.,DFM
2. Dr. Hamzah Halim,SH.,MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA PESSE/KECAMATAN DONRI-DONRI/KAB. SOPPENG)

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,



Dr. Hamzah Halim,SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN DONRI - DONRI
DESA PESSE**

Watansoppeng, 15 Maret 2017

Nomor : 14/DPS/III/2017
Lampiran :
Prihal : Hasil Pelaksanaan
Penelitian.-

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
di-
Makassar

1. Rujukan.
 - a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2015.
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor 1555/UN4.5.3/PL.02/2017.
2. Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu :
 - a. N a m a : A. MUH. IKHSAN WAHYULLAH REDITYA
 - b. N I M : B12113323
 - c. Program Study : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 - d. Alamat : Antang/BTN Makkio Baji/Manggala

Bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data/informasi guna penyusunan Skripsi pada Kantor Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dengan judul :

“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDY KASUS DESA PESSE, KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG)’.

Demikian untuk menjadi maklum.-

Plt. Kepala Desa

